

SKRIPSI

**STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI
KABUPATEN ENREKANG**



Oleh :

AGLIA MAYDIARNI

Nomor Induk Mahasiswa : 105641106119

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

**STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI
KABUPATEN ENREKANG**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)

Disusun dan Diajukan Oleh

Aglia Maydiarni

Nomor Stambuk : 105641106119

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

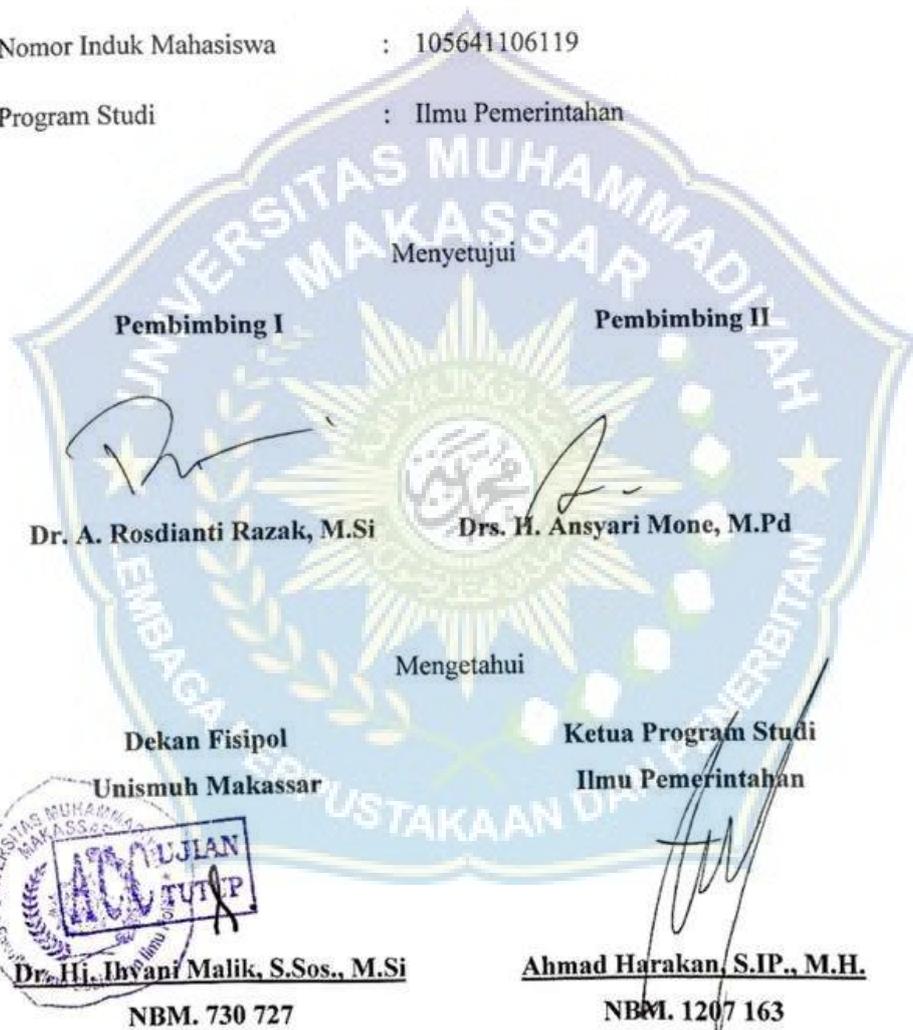
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Proposal : Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : Aglia Maydiarni

Nomor Induk Mahasiswa : 105641106119

Program Studi : Ilmu Pemerintahan



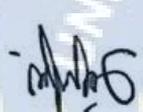
HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh tim penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Nomor : 0209/FSP/A.4-II/XII/45/2023 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu, 6 Januari 2024.

Mengetahui

Ketua

Sekretaris

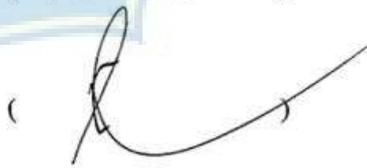

Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730727


Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM. 1207163

TIM PENGUJI

1. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si
2. Syukri, S.Sos., M.Si
3. Muhammad Randhy A, S.IP., M.Si







HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Aglia Maydiarni
Nomor Induk Mahasiswa :105641106119
Program studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah karya saya sendiri dan bukan plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai yang berlaku di universitas muhammadiyah makassar.

Yang menyatakan,


Aglia Maydiarni

Digitized by eLibrary

ABSTRAK

Aglia Maydiarni, A.Rosdianti Razak dan Ansyari Mone. Strategi Badan Penanggulangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Enrekang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang menjadi permasalahan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Enrekang. Kebakaran hutan dan lahan merupakan peristiwa yang berulang dan masalahnya terus berkembang diberbagai wilayah Indonesia salah satunya di Kabupaten Enrekang yang sering terjadi pada musim kemarau, peristiwa kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh penyebab langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung diantaranya api digunakan dalam pembukaan lahan, api digunakan sebagai senjata dalam masalah konflik, api menyebar secara tidak sengaja atau api yang berkaitan dengan ekstraksi sumber daya alam. Sedangkan penyebab tidak langsung umumnya berkaitan dengan penguasaan lahan, alokasi penggunaan lahan, degradasi hutan dan lahan, dampak dan perubahan karakteristik kependudukan serta lemahnya kapasitas kelembagaan. Dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang belum terlihat dengan jelas langkah-langkah antisipasi seperti pencegahan dini dengan mengimbau masyarakat melalui informasi di media sosial atau media online serta rambu-rambu di lokasi yang sering terjadi kebakaran.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari empat (4) orang diantaranya : Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretaris BPBD, Staf BPBD, Pegawai Kecamatan Anggeraja, dan masyarakat yang berada di kawasan kebakaran hutan dan lahan. Data yang dikumpulkan melalui Observasi, dokumentasi, dan wawancara secara langsung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian kebakaran hutan dan lahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Enrekang masih terdapat kekurangan pada pelaksanaan sebelum dan pasca terjadinya kebakaran terlihat dari partisipasi dan kesadaran masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan, sarana dan prasarana untuk kegiatan sebelum dan pasca kebakaran kurang memadai serta tidak terdapat kesiapsiagaan yang efektif pasca kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang.

Kata Kunci : Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, karunia kesehatan dan kenikmatan yang tak terhingga. Demikian pula salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan panutan dan contoh dalam beragama. Dengan keyakinan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Enrekang**”.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang penulis ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana di program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa untuk menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa mulai dari awal hingga akhir proses pembuatan skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Ada banyak hambatan dan cobaan yang selalu menyertainya, hanya dengan ketekunan, kerja keras, dan kerja ikhlas sehingga membuat penulis termotivasi menyelesaikan skripsi ini.

Terkhusus penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta **Ayahanda Edi dan Ibunda saya tercinta Ibunda Suarni S.Pd.** Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang tak pernah putus. Memberikan cinta, kasih sayang, doa dan pengorbanan yang mengiringi setiap

langkah untuk menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih telah mengantarkan sampai di titik ini. Terima kasih sudah berjuang untuk membesarkan dan mendidiknya sampai mendapatkan gelar sarjanaku. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kalian sampai melihatku berhasil, Hidup lebih lama.

Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi bantuan, semangat, dan motivasi terutama kepada :

1. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Harakan, S.IP., M.Hi selaku Ketua jurusan dan Ibu NurKhaerah, S.IP., M.IP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Rudi Hardi S.Sos., M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis ± 4 tahun menempahi jenjang pendidikan di bangku kuliah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. A. Rosdianti Razak, M.Si dan Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang selalu memberikan arahan dan dorongan atas penyelesaian skripsi penulis.
5. Segenap Dosen serta Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan pelayanan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

6. Bapak Ir. Asril Bagenda. M.M selaku kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
7. Informan penelitian yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi terkait penelitian ini.
8. Kepada seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Sospol Massenrempulu (HISMA) yang memberikan wadah silaturahmi serta sebagai tempat penulis ditempah menjadi mahasiswa yang mendalami disiplin ilmu soisal dan ilmu politik, terkhusus kepada teman-teman Angkatan 019 (Altruis).
9. Kepada teman-teman BEM FISIP yang memberikan warna dalam kehidupan semasa kuliah maupun berproses dalam sebuah lembaga internal kampus.
10. Kepada keluarga besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (HPMM) CAB. ANGGERAJA yang memberikan wadah silaturahmi untuk penulis serta memberikan pengalaman dalam berorganisasi.
11. Terima kasih yang tulus dan mendalam kepada sahabat terkasih, Intan Nurlisya, Uzlifatul Arsy, Zulawaliah, Sri suhelsi, Dewi Fourtuna, Sulfiyanti, Marwah yunida, Fitriani, yang selalu memberikan motivasi, dukungan serta doa selama ini dan semua pihak yang membantu dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. *Last but not least*, untuk diri saya sendiri Aglia Maydiarni. Terima kasih sudah bertahan, keluar dari zona nyaman, dan berjuang sampai saat ini atas banyaknya harapan dan impian yang harus diwujudkan. Terima kasih untuk selalu percaya

bahwa segala niat baik dan harapan akan selalu diberikan kemudahan. Selamat bergelar S.IP !!

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Dengan segala keterbatasan dan demi kesempurnaan skripsi ini, maka penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Konsep Dan Teori	10
C. konsep dan teori Kebakaran hutan dan lahan	22
D. Kerangka Pikir	25
E. Fokus Penelitian.....	26
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	27
BAB III	28
METODE PENELITIAN	28
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	28
B. Jenis dan Tipe penelitian	28
C. Sumber Data	29
D. Informan Penelitian	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data	31
G. Teknik Pengabsahan Data.....	33
BAB VI	34

HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang.....	34
B. Karakteristik Lokasi Penelitian.....	38
C. Hasil Penelitian	49
a. Aspek Preventif	56
b. Aspek Mitigasi.....	58
c. Praperednes (kesiapsiagaan).....	60
D. Pembahasan Hasil Penelitian	63
BAB V.....	70
PENUTUP	70
E. Kesimpulan	70
F. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan sebagai bagian dari sumber daya alam nasional memiliki arti dan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan dan lingkungan hidup. Telah diterima sebagai kesepakatan internasional bahwa hutan yang berfungsi penting bagi kehidupan dunia, harus dibina dan dilindungi dari berbagai tindakan yang berakibat hilangnya keseimbangan ekosistem dunia. Namun ada saja tindakan dari manusia yang melakukan perusakan hutan diantaranya melalui pembakaran hutan yang akhir-akhir ini semakin marak di Indonesia.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan peristiwa yang berulang dan masalahnya terus berkembang di berbagai wilayah Indonesia bahkan terjadi ketika musim kemarau, peristiwa kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh penyebab langsung maupun penyebab tidak langsung. Penyebab langsung diantaranya api digunakan dalam pembukaan lahan, api digunakan sebagai senjata dalam permasalahan konflik, api menyebar secara tidak sengaja atau api yang berkaitan dengan ekstraksi sumber daya alam. Sedangkan penyebab tidak langsung umumnya berkaitan dengan penguasaan lahan, alokasi penggunaan lahan, insentif/disentif ekonomi, degradasi hutan dan lahan, dampak dan perubahan karakteristik kependudukan serta lemahnya kapasitas kelembagaan.

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menjadi permasalahan krusial yang banyak mendapat perhatian

publik di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari ancaman nyata kebakaran hutan dan lahan yang berdampak luas kedalam kehidupan masyarakat.

Secara normatif bahwa undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang penanggulangan Bencana, telah mengamanatkan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana sebagai wujud kemandirian daerah. Perhatian pemerintah untuk menekan resiko bencana sangat penting terutama di Kabupaten Enrekang sebagai daerah rawan bencana alam. Kabupaten Enrekang memiliki ancaman bencana alam seperti, ancaman gerakan tanah, ancaman banjir, ancaman kekeringan, ancaman kebakaran hutan dan lahan, ancaman erosi, ancaman kebakaran gunung, pemukiman dan hutan, ancaman cuaca ekstrim, ancaman epidemi dan wabah penyakit dan ancaman konflik.

Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang tahun 2019 terdapat 10 kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang diantaranya, 3 kasus di Kecamatan Anggeraja, 10 kasus di Kecamatan Maiwa, 3 kasus di Kecamatan Enrekang, 2 kasus di Kecamatan Cendana dan 1 kasus di Kecamatan Buntu Batu. Dari jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat serta adanya aktivitas pembukaan lahan untuk usaha pertanian, maupun perkebunan Tribun Enrekang.com, (2019).

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan. Tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah dalam pasal 3 Ayat 2 mempunyai fungsi a. Perumusan dan penetapan kebijakan dan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, dan b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Namun mengubah paradigma dalam mencegah terjadinya dampak kebakaran hutan dan lahan belum menjadi hal serius yang dilakukan oleh pemerintah keberhasilan pencegahan kebakaran hutan dan lahan ditentukan sampai dimana keseriusan dalam membina dan mendidik masyarakat pengguna api lahan, serta metode pencegahan yang diterapkan.

Akan tetapi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang belum terlihat langkah-langkah antisipasi seperti pencegahan dini dengan mengimbau masyarakat melalui informasi di media sosial atau media online serta rambu-rambu di lokasi yang sering terjadi kebakaran. Selain itu, peningkatan peran masyarakat sepertinya hanya terlihat saat kebakaran terjadi yaitu melakukan upaya pemadaman api, bahkan dilapangan masih terdapat hambatan saat melakukan pemadaman sebab pihak BPBD maupun relawan tidak didukung oleh peralatan yang memadai sehingga hanya menggunakan peralatan seadanya karena mobil pemadam kebakaran tidak mampu menjangkau lokasi kebakaran yang berada di lereng bukit maupun pegunungan.

Kebakaran hutan dan lahan terjadi disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama yaitu faktoralami dan faktor kegiatan manusia yang tidak terkontrol. Faktor alami antara

lain oleh pengaruh El-Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan sehingga tanaman menjadi kering.

Kejadian kebakaran hutan dan lahan juga menjadi isu lingkungan di dunia menimbulkan dampak yang merugikan. Dampak kejadian kebakaran hutan dan lahan bersifat multidimensi meliputi dampak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berbagai upaya pemerintah melakukan pencegahan dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan yaitu: 1. memantapkan kelembagaan penanganan kebakaran hutan di setiap sektor yang berhubungan dengan kehutanan 2. melengkapi perangkat lunak berupa pedoman dan petunjuk teknis pencegahan dan penganggulangan kebakaran hutan 3. dalam setiap persetujuan pelepasan kawasan hutan bagi pembangunan non kehutanan, selalu disyaratkan pembukaan hutan tanpa bakar.

Sebagai upaya merubah pola pikir dan kebiasaan maka Strategi perlu dilakukan dalam upaya untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan dengan upaya lain untuk mengatasi berbagai hambatan. Manajemen strategi adalah proses dalam pengambilan keputusan, menerapkan tindakan dan mengevaluasi hal apa saja yang sudah dilakukan secara baik agar bisa mencapai tujuan jangka panjang perusahaan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi sebagaimana yang telah diuraikan diatas peneliti berpendapat bahwa perlunya dilakukan penelitian dengan judul :

"Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Enrekang"

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian adalah “Bagaimana strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pengendalian kebakaran hutan lahan di Kabupaten Enrekang?”.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pengendalian kebakaran hutan lahan di Kabupaten Enrekang

C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan secara teoritis kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pengendalian kebakaran hutan lahan di Kabupaten Enrekang

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pengendalian kebakaran hutan lahan di kabupaten Enrekang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mempunyai fungsi untuk membantu penentuan tujuan dan alat penelitian dengan memilih konsep-konsep yang tepat. Penelitian terdahulu sebagai landasan untuk menganalisis perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan. Bagian ini memuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan di kaji dalam penelitian. Berikut adalah hasil-hasil penelitian terdahulu antara lain :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul penelitian	Metode	Hasil dan Pembahasan
1.	(Fahri Alqadri, 2020)	Penguatan Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Enrekang	Kualitatif	Hasil penelitian tersebut adalah penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang masih terdapat kekurangan pada pelaksanaan sebelum dan pasca terjadinya kebakaran terlihat dari alokasi anggaran yang masih minim untuk masalah perbaikan, sarana dan prasarana

				untuk kegiatan sebelum dan pasca kebakaran kurang memadai serta tidak terdapat kerja sama pasca kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang.
2.	(Yuniar, Meiliyana, Apandi, 2022)	Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir Sumatera Selatan	Kualitatif	Hasil penelitian tersebut adalah : (1) Hasil Penelitian Strategi Organisasi Merajuk kepada hasil penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara terhadap informan diketahui bahwa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir Sumatera Selatan telah melakukan strategi organisasi dan telah melakukan persiapan personil. (2) Hasil penelitian strategi program merajuk pada hasil penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara terhadap informan diketahui bahwa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Iilir Sumatera Selatan telah melakukan strategi program, telah melakukan program berupa sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya

				<p>kebakaran hutan dan lahan. (3) Hasil penelitian strategi pendukung sumber daya merujuk kepada hasil penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara terhadap informan diketahui bahwa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan telah melakukan strategi pendukung sumber daya.</p>
3.	(Tiwi candya, Chandya 2021)	Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencegahan kebakaran hutan di Kabupaten Ketapang	Kualitatif	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang merupakan penjelasan mengenai data selama penelitian di lapangan terhadap Manajemen Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pencegahan kebakaran hutan di Kabupaten Ketapang, diperoleh data dan informasi melalui obserfasi dan wawancara mendalam terhadap informan yang ditemui dilapangan serta dokumentasi.</p>

B. Konsep Dan Teori

1. Konsep strategi

Strategi memiliki banyak sekali definisi dalam perkembangannya sebagai sebuah konsep. Strategi sendiri berasal dari bahasa Yunani yakni *strategeia*, yang memiliki arti kepemimpinan dalam ketentaraan dan strategi adalah proses penentuan rencana pada pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka Panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat di capai. Dalam perkembangannya, definisi konsep strategi menurut carter yaitu

Menurut Carter (2008) disebutkan bahwa tindakan dari semua unsur tidak akan berhasil jika tidak ada sinergi dan koordinasi yang baik antara semua unsur. Carter menekankan dengan mengatakan pentingnya pengorganisasian dalam menangani bencana. Harus ada organisasi yang baik, mulai dari level tertinggi hingga terendah. Semua berada dalam kerangka organisasi yang terstruktur dan sistematis. Carter menyebutnya sebagai mekanisme organisasi. Semua harus dalam bingkai sinergitas atau kesatuan dan saling melengkapi.

2. Tipe-tipe strategi Integrasi

- a) Integrasi ke Depan (*forward integration*) Integrasi ke depan (*forward integration*) adalah upaya memiliki atau meningkatkan kendali atas distributor atau pengecer. Saat ini semakin banyak perusahaan manufaktur (pemasok) yang menjalankan strategi integrasi kedepan dengan cara mendirikan situs web untuk menjual produk-produk mereka secara langsung kepada konsumen. Strategi tersebut menyebabkan gejolak di sejumlah industri.

- b) Integrasi ke Belakang (*Backward integration*) Integrasi ke belakang (*backward integration*) adalah strategi untuk mencoba memiliki atau meningkatkan kontrol terhadap perusahaan pemasok. Strategi ini sangat tepat di gunakan ketika perusahaan pemasok saat ini tidak dapat diandalkan, terlalu mahal, atau tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Persaingan global juga memacu perusahaan untuk mengurangi jumlah pemasoknya dan menuntut pelayanan dan mutu yang lebih baik dari yang ada sekarang ini.
- c) Integrasi Horizontal (*Horizontal Integration*) Strategi pertumbuhan integrasi horizontal dilakukan melalui akuisisi perusahaan pesaing yang memiliki *line of business* yang sama. Yang dapat dilakukan dalam strategi ini adalah dengan meningkatkan ukuran perusahaan, meningkatkan penjualan, keuntungan dan pasar potensial dari perusahaan.

3. Indikator Strategi

Menurut KBBI, definisi Indikator adalah sesuatu yang bisa memberikan petunjuk atau keterangan. (Indikator Strategi menurut Carter, 2008) yaitu

a. Aspek Preventif

Aspek Preventif adalah intervensi fisik mengawali kegiatan atau proses pembangunan fisik revitalisasi dan dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung. Berdasarkan data dari masing-masing satgas kerhutla di provinsi prioritas, pada konteks terjadinya peristiwa kerhutla, kegiatan preventif yang sudah dilakukan yaitu: 1. Sosialisasi

kepada masyarakat, 2. Edukasi dan penyuluhan, 3. Penyelidikan, 4. Melakukan sayembara bagi pihak-pihak yang bisa menangkap pelaku pembakaran lahan, 5. Publikasi/Opini melalui media massa, 6. Pembuatan sekat kanal, 7. Inovasi teknologi.

b. Aspek Mitigasi

Mitigasi yang di maksud merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana, baik itu bencana alam, atau akibat ulah manusia. Beberapa tindakan mitigasi yang dilakukan yaitu:

1. Pendataan dan pencatatan, untuk mengetahui sebaran dan potensi resiko bencana, sehingga bisa dilakukan upaya-upaya meminimalisir dampak yang terjadi, 2. Patroli rutin, aktifitas patroli rutin merupakan tindakan yang dilakukan oleh satgas terhadap lokasi-lokasi yang memang disinyalir memiliki potensi terjadi kerhutla, 3. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam organisasi desa peduli api.

c. Kesiapsiagaan (Preparedness)

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Carter (2008) menjelaskan bahwa dalam kegiatan manajemen pengelolaan bencana, aspek pra bencana harus betul-betul diperhatikan dengan serius.

4. Manajemen Strategi

Manajemen Strategi Menurut (Chandya 2021) Manajemen Strategik adalah suatu seni dan ilmu dari pembuatan (formulating), penerapan (implementing), dan evaluasi (evaluating) tentang keputusan-keputusan strategis antara fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan masa mendatang. Pendapat yang lain yaitu manajemen strategic adalah proses yang berkesinambungan dimulai dari perumusan strategi, dilanjutkan dengan pelaksanaan kemudian bergerak kearah suatu peninjauan kembali dan penyempurnaan strategik tersebut, karena keadaan didalam dan diluar perusahaan/ organisasi yang selalu berubah. Proses manajemen strategik adalah cara yang akan dilakukan para penyusun strategi menentukan tujuan-tujuan dan juga membuat keputusan-keputusan strategic, keputusan strategik juga untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Munawir, Maskupah, and Kurniawan (2019) Manajemen Stratejik merupakan proses penetapan misi, visi, dan tujuan organisasi, serta pengembangan kebijakan dan program pelaksanaan untuk mencapainya. Oleh karena itu, untuk menjalankan manajemen stratejik, suatu organisasi perlu mengetahui dimana posisi organisasi perusahaan itu sekarang berada, kemana tujuan perusahaan yang direncanakan akan dituju, serta bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Penetapan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada suatu jangka waktu di masa depan, merupakan awal dari manajemen stratejik. Kemudian diikuti oleh pengkajian stratejik ditetapkan bagaimana organisasi beraktivitas dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Pemerintah daerah di atur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang

pemerintah daerah, yang kemudian di perbaharui sebanyak dua (2) kali. Manajemen Strategis yaitu serangkaian ketentuan dan kegiatan administratif yang memastikan kinerja perusahaan dalam masa yang lama (J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, 2003). Manajemen Stratejik merupakan cara untuk menentukan misi, visi, dan tujuan organisasi serta peningkatan kebijakan dan program penerapan untuk mencapainya (Softjan, 2016). Oleh karena itu, untuk menerapkan manajemen stratejik, suatu organisasi perlu memahami posisi organisasi perusahaan sekarang berada dimana, kemana tujuan perusahaan yang direncanakan akan dituju, serta bagaimana cara yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Penentuan tujuan dan target yang akan dicapai pada suatu jangka waktu di masa depan, merupakan awal dari manajemen stratejik. Kemudian diikuti oleh pemeriksaan stratejik ditetapkan bagaimana organisasi beraktivitas dalam upaya untuk mencapai tujuan dan target tersebut. Ada empat fungsi atau tujuan manajemen strategi yang dijelaskan Suwandiyanto(2010) adalah :

- a) Membagikan petunjuk perolehan tujuan organisasi/perusahaan, maksud hal ini organisator wajib bisa memperlihatkan untuk segala sisi kemana petunjuk tujuan organisasi. Oleh sebab itu, tujuan yang pasti bisa dijadikan fondasi bagi pengendalian dan catatan keberhasilan.
- b) Menolong mempertimbangkan keperluan semua sisi, organisasi maupun perusahaan wajib menyatukan keperluan berbagai sisi, penyuplai, pegawai, pemegang saham, sisi yang berkuasa, serta masyarakat banyak yang mempunyai peran terhadap berhasil dan gagal perusahaan maupun organisasi.

- c) Mengantisipasi semua modifikasi ulang dengan rata, manajemen strategi membiarkan eksekutif puncak agar mengantisipasi modifikasi serta merencanakan arah dan pengendalian, sehingga bisa memperbanyak waktu/berpikir mereka dari perspektif dan menyiapkan rencana yang bagus bagi hari ini dan hari esok
- d) Berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas, tanggung jawab organisator tidak hanya memfokuskan kepada kelebihan atas kepentingan efisiensi, tetapi seharusnya memberikan perhatian.

4. Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan

Strategi pengendalian kebakaran hutan menurut Saharjo and Waldi (2019) merupakan semua aktivitas untuk melindungi hutan dari kebakaran liar dan penggunaan api untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan hutan. Pengendalian kebakaran hutan mencakup tiga komponen kegiatan yaitu:

- a. Pencegahan terjadinya kebakaran hutan.

Pencegahan kebakaran hutan merupakan kegiatan awal yang paling penting dalam pengendalian kebakaran dan merupakan pekerjaan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Pencegahan kebakaran merupakan cara yang lebih ekonomis untuk mengurangi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh kebakaran, tanpa harus menggunakan peralatan yang mahal. Adapun strategi yang dapat dijadikan acuan dalam usaha pencegahan terjadinya kebakaran meliputi:

- 1) Pendekatan Sistem Informasi, merupakan salah satu strategi yang digunakan dalam pengendalian hutan dan lahan, secara konvensional sistem informasi ini

dilakukan dengan pemantauan langsung di lapangan (lokasi rawan kebakaran), penggunaan peta dan kompas serta penggunaan peta dan kompas sebagai alat untuk menginformasikan kepada warga masyarakat tentang kemungkinan terjadinya kebakaran. Tetapi saat ini, bantuan teknologi modern seperti computer, alat telekomunikasi, internet, pengiinderaan jauh dapat dikembangkan sistem informasi kebakaran kondisi bahan bakar.

- 2) Pendekatan Sosial Ekonomi Masyarakat, ini akan lebih dijelaskan tentang partisipasi dan peran masyarakat lokal dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam suatu kelompok yang mendorongnya untuk bersedia memberikan sumbangan bagi tercapainya tujuan kelompok dan turut bertanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukan kelompoknya. Dorongan dan rangsangan untuk berpartisipasi mencakup faktor-faktor kesempatan, kemauan, kemampuan dan bimbingan.
- 3) Pendekatan Pengelolaan Hutan dan lahan, Penentuan tindakan pengelolaan hutan dan lahan (persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan) yang tepat akan dapat mengendalikan terjadinya peristiwa kebakaran. Dalam persiapan lahan, dengan alasan ekonomis dan dapat meningkatkan kesuburan tanah, sebagian besar masyarakat dan perusahaan kehutanan/perkebunan melakukan persiapan lahan dengan teknik pembakaran, dimana akhirnya pembakaran ini tidak terkendali, merembet dan terjadi kebakaran.

b. Pemadaman kebakaran hutan

Tindakan pemadaman secepat mungkin harus dilakukan jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, Adapun menurut (Ananda et al. 2022) strategi pemadaman yang dapat dilakukan dalam melakukan kegiatan operasi pemadaman agar kegiatan pemadaman berjalan dengan efektif (lancar, cepat, aman dan tuntas), yaitu.

- 1) Penggalangan Sumber Daya Manusia, Keterlibatan berbagai unsur masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Instansi dan Dinas terkait dan lain-lain, dalam tindakan pemadaman sangat diperlukan mengingat dalam tindakan pemadaman dibutuhkan sumber daya manusia yang cukup banyak. Keberadaan tim pengendalian kebakaran akan sangat membantu dalam tindakan pemadaman.
- 2) Identifikasi dan Pemetaan Sumber Air, merupakan identifikasi dan pemetaan sumber air pada areal hutan dan lahan yang rawan terbakar perlu dilakukan. Identifikasi biasanya dilakukan pada saat musim kemarau sehingga pada saat terjadi kebakaran, sumber-sumber air yang telah teridentifikasi masih terisi air. Ini digunakan untuk mempermudah petugas pemadam kebakaran dalam proses pemadaman, karena air merupakan faktor utama yang harus ada dalam pemadaman api di hutan dan lahan.
- 3) Dukungan dana, pada waktu yang tepat sangat diperlukan dalam operasi kegiatan pemadaman. Dana ini dapat dimanfaatkan untuk penyediaan konsumsi tim pemadam lapangan, memobilisasi masyarakat untuk membantu kegiatan pemadaman, penambahan peralatan pemadaman serta pengadaan

sarana pengobatan untuk korban kebakaran. d. Sarana dan Prasarana Pendukung, Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

c. Tindakan Pasca Kebakaran Hutan meliputi:

- 1) Penilaian Dampak Kebakaran, dilakukan setelah terjadinya kebakaran, dengan tujuan untuk mengetahui dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan dari berbagai sudut pandang, baik dari segi ekonomi, ekologi, sosial maupun Kesehatan
- 2) Upaya Yuridikasi, dilakukan untuk mengetahui siapa penyebab kejadian kebakaran, bagaimana prosesnya dan berapa besar kerugian yang diakibatkan dan selanjutnya melakukan upaya yuridikasi untuk menuntut si pelaku ke muka pengadilan,
- 3) Rehabilitasi, merupakan upaya manusia untuk mempercepat proses suksesi sehingga proses penutupan lahan dapat berlangsung segera. Meskipun proses suksesi dapat berlangsung secara alami tetapi hal ini akan berlangsung dalam waktu yang lama.

Menurut peraturan menteri kehutanan No. P.12/Menhut-II/2009 tentang pengendalian kebakaran hutan. Pengendalian kebakaran hutan adalah semua usaha, pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan dan penyelamatan. Dalam peraturan menteri kehutanan ini mencangkup 3 komponen sebagai berikut;

- a) Pencegahan Kebakaran Hutan Pencegahan

(Suhendri and Purnomo 2017) kebakaran semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan. Pencegahan kebakaran hutan dilakukan pada tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, tingkat unit pengelolaan hutan konservasi, tingkat kesatuan pengelolaan hutan produksi, tingkat kesatuan pengelolaan hutan lindung; dan tingkat pemegang izin pemanfaatan hutan, tingkat pemegang izin penggunaan kawasan hutan, tingkat pemegang izin hutan hak dan hutan konservasi. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan tingkat kabupaten/kota meliputi Evaluasi lokasi rawan kebakaran hutan, Penyuluhan, Pembuatan petunjuk teknis pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan, Pengadaan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutane, Pelaksanaan pembinaan, dan pengawasan.

b) Pemadaman Kebakaran Hutan

Menurut (Qodriyatun 2014) Pemadaman kebakaran hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan. Pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran hutan pada masing masing wilayah dilakukan melalui tahapan kegiatan:

- 1) Pemadaman awal, dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran yang lebih besar saat ditemukan titik api (kejadian kebakaran) oleh regu patroli yang bertugas dan atau yang ditugaskan melakukan pengecekan lapangan terhadap titik panas melalui

pemadaman seketika tanpa menunggu perintah dari posko daerah operasi (Daops) setempat,

- 2) Pemadaman lanjutan, dilakukan dalam rangka menindaklanjuti upaya pemadaman yang tidak dapat dipadamkan pada saat pemadaman awal, dengan memobilisasi regu pemadaman kebakaran pada daops setempat dan atau regu dari Daops lain dan atau instansi lain yang terkait.
- 3) Pemadaman mandiri, dilakukan dalam rangka pemadaman kebakaran yang dilaksanakan secara mandiri dengan menggunakan personil, sarana prasarana dan dukungan logistik yang berada pada wilayah kerja Daops setempat.
- 4) Pemadaman gabungan, dilakukan dalam rangka pemadaman kebakaran yang dilaksanakan dengan menggunakan personil, sarana prasarana dan dukungan logistik yang berada pada daops setempat dan atau regu dari Daops lain dan atau instansi lain yang terkait.
- 5) Pemadaman dari udara, dilakukan dalam rangka pemadaman kebakaran baik pada pemadaman awal maupun pemadaman lanjutan dan atau pemadaman dengan menerapkan teknologi modifikasi cuaca oleh tim operasi yang menggunakan pesawat terbang.

d. Penanganan Pasca Kebakaran

Menurut Lumabi, Ratag, and Kalangi (2022) penanganan pasca kebakaran adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan

evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani suatu areal setelah terbakar.

Penanganan pasca kebakaran hutan dilakukan melalui kegiatan.

- 1) Pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket), dilakukan melalui pengecekan lapangan pada areal yang terbakar dengan menggunakan data titik panas yang terpantau, pengumpulan contoh tanah, tumbuhan, dan bukti lainnya di areal yang terbakar.
- 2) Identifikasi, dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran, luas kebakaran, tipe vegetasi yang terbakar, pengaruhnya terhadap lingkungan dan ekosistem.
- 3) Monitoring dan evaluasi, dilakukan untuk memantau kegiatan pengendalian kebakaran yang telah dilakukan dan perkembangan areal bekas kebakaran. (d). Rehabilitasi, dilakukan dalam rangka merehabilitasi kawasan bekas kebakaran dengan mempertimbangkan rekomendasi dan atau masukan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil identifikasi.
- 4) Penegakan hukum, dilakukan dalam rangka upaya proses penindakan hukum dibidang kebakaran hutan dengan diawali kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan yang berkaitan dengan terjadinya pelanggaran sebagai bahan penyidikan.

5. Pengertian Penanggulangan

Kata penanggulangan berasal dari kata dasar tanggulang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggulang adalah suatu kata kerja yang memiliki arti menghadapi atau mengatasi, sedangkan untuk pengertian penanggulangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu proses cara, atau

perbuatan menanggulangi. Sedangkan definisi lain menurut Peraturan Bupati Bengkalis No. 23 tahun 2015 penanggulangan merupakan semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menimalisir kebakaran atau menghilangkan kebakaran. Pada penelitian ini yang dimaksud dalam penanggulangan adalah cara yang dilakukan oleh UPT DAMKAR Duri dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kota Duri Kabupaten Bengkalis. Penanggulangan Kebakaran adalah suatu kegiatan yang dirancang menjadi sebuah strategi yang dilakukan oleh UPT DAMKAR Duri Kabupaten Bengkalis untuk meminimalisir terjadinya kebakaran bahkan menghilangkan kebakaran yang ada di wilayah Kota Duri Kabupaten Bengkalis. Dengan melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, diharapkan jumlah kebakaran yang ada dapat diminimalisir atau dihilangkan agar terhindar dari dampak negatif dari kebakaran hutan dan lahan.

C. konsep dan teori Kebakaran hutan dan lahan

1. Pengertian Kebakaran Hutan

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) Kebakaran adalah sebuah fenomena yang terjadi ketika suatu bahan mencapai temperatur kritis dan bereaksi secara kimia dengan oksigen (sebagai contoh) yang menghasilkan panas, nyala api, cahaya, asap, uap air, karbon monoksida, karbondioksida, atau produk dan efek lain. Berdasarkan definisi dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/Menhut-II/2019 Kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Sedangkan definisi kebakaran hutan menurut Peraturan Bupati Bengkalis No. 23 tahun 2015 merupakan proses nyala api yang terjadi dikawasan

hutan dan lahan serta disebabkan akibat ulah manusia atau bencana alam. Kebakaran terjadi ketika material atau benda yang mudah terbakar dengan cukup oksigen atau bahan yang mudah teroksidasi bertemu dengan sumber panas dan menghasilkan reaksi kimia. Untuk membentuk suatu kebakaran maka diperlukan adanya unsur-unsur yang satu sama lain saling mempengaruhi, tanpa adanya salah satu unsur pembentuknya maka kebakaran tidak akan terjadi. Dilihat dari bahan bakar yang terbakar dan cara penjaralan api, kebakaran hutan dan lahan digolongkan menjadi 3 tipe kebakaran (Rasyid 2014) yaitu: (a). Kebakaran Bawah (Ground Fire) merupakan kebakaran yang membakar bahan-bahan organik dibawah permukaan tanah yang meliputi bahan organik yang sedang membusuk, humus dan lapisan tanah bagian atas. Penjaralan api lambat tetapi terus berlanjut dan tidak menampilkan nyala api, sehingga sulit diketahui arah kebakaran ke segala arah sehingga kebakaran bawah berbentuk lingkaran, (b). Kebakaran Permukaan (Surface Fire) Kebakaran permukaan terjadi di lantai hutan, bahan bakarnya antara lain berupa serasah dan tumbuhan bawah yang ada dilantai hutan. Kebakaran ini menjalar pada vegetasi yang lebih tinggi dan penjaralannya dimulai dari permukaan lantai hutan. Penjaralan api berbentuk lonjong atau elips karena mendapat pengaruh angin, (c). Kebakaran atas (Crown Fire) Kebakaran atas disebut pula kebakaran tajuk. Kebakaran tajuk dapat terjadi karena adanya kebakaran permukaan yang menjalar ke arah tajuk pohon, atau sebaliknya. Kebakaran jenis ini mempercepat terjadinya kebakaran berkembang dari tajuk suatu pohon ke pohon lainnya.

2. Faktor Penyebab Kebakaran Hutan dan lahan

(Loren et al. 2015) Secara garis besar penyebab kebakaran hutan dan lahan berasal dari kejadian alam dan kegiatan manusia. Di Indonesia kejadian alam yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan jarang terjadi. Kebakaran hutan oleh faktor manusia kasusnya akan menjadi lebih kompleks. Dalam hal ini faktor sosial ekonomi dan ketidaktahuan penduduk merupakan pendorong utama atas terjadinya kebakaran hutan, Adapun penyebab tidak langsung kebakaran hutan dan lahan yaitu:

1) Musim Kemarau

Faktor cuaca merupakan faktor utama penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan, meliputi: angin, suhu, curah hujan, keadaan air tanah dan kelembapan relatif. Pada musim kemarau banyak bermunculan berita mengenai kebakaran hutan dan lahan. Tapi, bukankah musim kemarau bisa diprediksi sebelumnya sehingga segala sesuatunya harus dipersiapkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada saat musim kemarau panjang.

2) Penguasaan Lahan

Masalah ini merupakan masalah utama yang kerap terjadi hampir di seluruh lokasi hutan dan perkebunan, karena adanya masalah yang paling utama yang berkembang pada masyarakat tentang lemahnya keintensifan untuk mengontrol api supaya tidak menyebar ke lahan milik perkebunan atau hutan yang mana mereka merasa bertanggung jawab untuk melakukan hal itu. Pada dasarnya, sebagian besar kebakaran hutan terjadi karena ulah manusia. Hal ini disebabkan karena api dianggap sebagai alat yang paling efektif, murah dan cepat dalam membersihkan tapak penanaman.

3) Bahan Bakar

Faktor yang mempengaruhi hutan dan lahan seperti kegiatan penebangan/pembalakan liar dapat menjadi bahan bakar. Bahan bakar dianggap sebagai sumber penyebab terjadinya kebakaran hutan, ini dikarenakan jika tidak ada bahan bakar tentu saja meskipun datang musim kemarau dan ada yang melakukan penyulutan di tempat kejadian kebakaran tidak akan terjadi. d. Kesengajaan Manusia Bencana kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana tahunan yang telah terjadi di Indonesia sejak lama. Salah satu faktornya yaitu karena kelalaian manusia itu sendiri seperti membuang puntung rokok, meninggalkan bekas api unggun, membakar dengan teknik obat nyamuk yang akan menguntungkan diri sendiri.

4) Perubahan Karakteristik

Kependudukan Peningkatan jumlah penduduk oleh tingginya tingkat migrasi dalam skala besar baik secara spontan maupun melalui program transmigrasi berpengaruh terhadap pembukaan hutan dan lahan, dimana api digunakan sebagai teknik dalam persiapan lah

D. Kerangka Pikir

Menjelaskan bahwa dalam kegiatan strategi pengelolaan bencana, aspek pra bencana harus betul-betul diperhatikan dengan serius. Ia membagi menjadi tiga aktifitas yaitu (1) preventif, (2) mitigasi, (3) kesiapsiagaan/preparedness. Preventif adalah upaya yang dilakukan agar bencana tidak terjadi, mitigasi adalah upaya untuk meminimalisir dampak bencana, sedangkan kesiapsiagaan adalah langkah cepat yang harus dilakukan untuk merespon terjadinya bencana. Memaksimalkan semua tahapan

tersebut akan menentukan kesuksesan dalam mencegah terjadinya bencana. Carter juga memberikan tekanan utama pada aspek preventif ketimbang sisi mitigasi dan kesiapsiagaan. Dikatakannya bahwa preventif adalah aspek utama karena bisa mencegah bencana terjadi.

Bagan Kerangka Pikir



Tabel 2.2 Kerangka Pikir

E. Fokus Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir di atas maka fokus penelitian ini adalah terkait Strategi Dalam Pencegahan Kebakaran hutan dan lahan Revitalisasi Kabupaten Enrekang yang menpegaruhi, Aspek Preventif, Aspek Preventif dan kesiapsiagaan (Preparedness)

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat mendeskripsikan Strategi Dalam Pencegahan Kebakaran hutan dan lahan Revitalisasi Kabupaten Enrekang dalam strategi revitalisasi yang dimaksudkan adalah revitalisasi yang diberikan oleh pihak pemerintah Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

1. Aspek Preventif

Intervensi fisik mengawasi kegiatan atau proses pembangunan fisik revitalisasi dan dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung.

2. Aspek Mitigasi

Mitigasi yang dimaksud merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana, baik itu bencana alam, atau akibat ulah manusia.

3. Kesiapsiagaan (Preparedness)

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Carter (2008) menjelaskan bahwa dalam kegiatan manajemen pengelolaan bencana, aspek pra bencana harus betul-betul diperhatikan dengan serius.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada 24 Maret 2023 – 14 Mei 2023, penelitian ini dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang. Adapun alasan memilih lokasi karena di Badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Enrekang memiliki masalah yang cukup serius maka peneliti tertarik untuk meneliti.

B. Jenis dan Tipe penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggambarkan kesadaran objek yang akan diteliti. Selain itu juga tipe penelitian ini juga merupakan gagasan realita sosial, fakta sosial atau fakta sosial yang menjadi masalah penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dibagi dalam dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer, adalah data peneliti yang didapat secara langsung dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek penelitian peneliti. Dimanapun para informan ini berada, peneliti mendatangi dan melakukan wawancara *face to face* (bertatapapan langsung) untuk mendapatkan hasil atau data yang valid dari informan secara langsung dalam penelitian yang akan dilakukan ini dengan cara *purposive sampling* (teknik pengambilan sampel) dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang dipergunakan untuk melengkapi data primer yang sekaligus sebagai data pendukung. Data sekunder yaitu data yang digunakan sebagai alat penunjang dalam penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya serta diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Informan adalah pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang yang telah menjadi masalah dan dinilai memiliki informasi tentang revitalisasi anjungan sungai Mata Allo Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Mengetahui dan terlibat langsung maupun mempunyai pengaruh dalam penelitian ini yaitu

No	Informan Penelitian
1.	Kepala Pelaksana/Sekretaris BPBD
2.	Staf BPBD
3.	Pegawai Kecamatan Anggeraja
4.	Masyarakat

Tabel 3.1 Informan Penelitian

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan triangulasi/gabungan. Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik dalam pengumpulan data yang bersifat menyatukan dari berbagai satuan sumber data yang telah ada dengan teknik pengumpulan data.

1. Observasi

Metode penelitian ini digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau yang sebenarnya sedang berlangsung, meliputi kondisi sumber daya manusia, kondisi sarana dan prasarana yang ada, proses penganggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta kendala-kendala dalam penganggaran dan kondisi lain yang dapat mendukung hasil penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengamati bagaimana strategi pembangunan tata wilayah dalam revitalisasi anjungan sungai Mata Allo Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Pengumpulan data ini berdasarkan dari pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau pengetahuan pribadi.

3. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat dan autobiografi. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif.

1. Pengumpulan Data

Data yang sudah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam setiap catatan lapangan. Catatan lapangan tersebut dikumpulkan dan kemudian diambil bagian-bagian yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis dalam bentuk laporan atau uraian yang rinci kemudian disederhanakan dan difokuskan pada hal yang penting dan dilakukan kategorisasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Di lapangan data yang didapat sangat banyak sehingga perlu diteliti dan dirincikan sesuai dengan fokus penelitian yaitu tentang pembangunan tata wilayah dalam revitalisasi anjungan sungai Mata Allo Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung dan merupakan bagian dari analisis.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Informasi ini termasuk didalamnya matrik, skema, table dan jaringan kerja yang berkaitan dengan kegiatan. Dengan penyajian data peneliti akan mengerti apa yang akan terjadi dan dapat mengerjakan penelitian tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi (*conclusions drawing and verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan intisari dan makna dari sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk pernyataan yang singkat dan padat tetapi mengandung pengertian yang bermakna. Peneliti berupaya mencari makna dari data dan kemudian membuat kesimpulan. Sebelum menarik kesimpulan, peneliti harus mencari pola, hubungan persamaan dan sebagainya

antar detail untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Dalam proses penyimpulan data merupakan suatu proses yang membutuhkan suatu pertimbangan

G. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Dimana triangulasi bermakna silang dengan mengadakan pengecekan akan keberadaan data yang dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain dengan cara pengecekan diwaktu yang berbeda.

1. Triangulasi Sumber

Penelitian dalam hal ini melakukan triangulasi sumber dengan cara mencari informasi dari sumber lain atas informasi yang didapat dari informasi sebelumnya.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode ini untuk menguji akuratnya sebuah data maka peneliti menggunakan triangulasi metode menggunakan teknik yang berbeda dengan teknik yang digunakan sebelumnya.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data peneliti.

BAB VI

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang disebut juga dengan MASSENREMPULU yang berarti meminggir gunung atau disebut juga dengan menyusuri gunung, sedangkan sebutan Enrekang berasal dari ENDEKAN yang berarti panjat. Dalam pengertian umum yang sampai saat ini masih ada bahkan dalam administrasi pemerintahan dikenal dengan nama “ENREKANG” menurut orang Bugis, daerah Kabupaten Enrekang sering disebut sebagai daerah pegunungan karena terdiri pegunungan dan perbukitan yang sambung menyambung dengan luas $\pm 84,96\%$ sedangkan datar $15,04\%$ dari seluruh luas wilayah sekitar $1.786.01 \text{ km}^2$.

a. Letak Geografis

Kabupaten Enrekang dengan Ibukota Enrekang terletak $\pm 235 \text{ km}$ sebelah utara Kota Makassar. Secara geografis Kabupaten Enrekang terletak pada koordinat antara $3^{\circ} 50' 00''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ} 40' 53''$ sampai $120^{\circ} 06' 33''$ Bujur Timur.

Berikut ini batas-batas wilayah Kabupaten Enrekang :

- Sebelah utara : Kabupaten Luwu
- Sebelah Selatan : Kabupaten Luwu
- Sebelah Timur : Kabupaten Sidrap
- Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang

Topografi wilayah Kabupaten Enrekang pada umumnya mempunyai wilayah topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, dan sungai dengan ketinggian 47 – 3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan Topografi wilayah-wilayah didominasi oleh bukit/gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%. Musim yang terjadi di Kabupaten Enrekang ini hampir sama dengan musim yang ada di daerah lain yang ada di Provinsi Sulawesi selatan yaitu musim hujan dan musim kemarau dimana musim hujan terjadi pada bulan November – Juli sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Agustus – Oktober.

Tabel 4.1

Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang

No	Kecamatan	Luaks Area (km ²)	Presentase luas Enrekang (%)
1.	Maiwa	392,87	21,99
2.	Bungin	236,84	13,26
3.	Enrekang	291,19	16,30
4.	Cendana	91,01	5,10
5.	Baraka	159,15	8,91
6.	Buntu Batu	126,65	7,09
7.	Anggeraja	125,34	7,02
8.	Malua	40,36	2,26
9.	Alla	34,66	1,94

10.	Curio	178,51	9,99
11.	Masalle	68,35	3,83
12.	Baroko	41,08	2,30
	Total	1.786,01	100

Sumber: BPS Enrekang

Berdasarkan tabel tersebut, kecamatan terluas adalah Kecamatan Maiwa yaitu 392,87 km² atau 22 persen dari luas Kabupaten Enrekang, sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Alla yaitu 34,66 km² atau 1,94 persen dari luas Kabupaten Enrekang.

Secara Administratif Kabupaten Enrekang terdiri dari 12 Kecamatan, 112 Desa dan 7 Kelurahan. Pada tahun 1995 di Kabupaten Enrekang hanya terdapat 54 Desa/Kelurahan yang tersebar dari 5 kecamatan. Dengan adanya perubahan situasi dan kondisi wilayah, maka pemekaran desa/kelurahan sudah menjadi keharusan. Pada tahun 1997 jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Enrekang dari 78 desa/kelurahan kondisi 1996 menjadi 108 desa/kelurahan. Demikian halnya pada tingkat kecamatan yang semula 5 Kecamatan menjadi 9 Kecamatan.

Pada pertengahan 2003 terjadi pemekaran sehingga bertambah 3 Desa menjadi 111 desa/kelurahan. Kemudian pada Tahun 2006 terjadi pemekaran desa dan kecamatan menjadi 112 desa/kelurahan, dan terakhir pada tahun 2008 dimekarkan kembali menjadi 12 kecamatan dan 129 desa/kelurahan.

Penduduk Kabupaten Enrekang berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 adalah 204.827 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,74%. Rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 100,80 distribusi penduduk menurut kecamatan menunjukkan kecamatan paling banyak penduduknya adalah kecamatan Enrekang sekitar 15,95% dari total penduduk kabupaten Enrekang. Sedangkan kecamatan paling sedikit adalah kecamatan Bungin 2,18%, untuk kepadatan penduduk di tahun 2018 Kecamatan Alla yang paling tinggi kemudian yang paling rendah adalah kecamatan Bungin. Untuk kondisi penduduk tahun 2019 akan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Enrekang tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Km ²)
1.	Maiwa	25.286	64,36
2.	Bungin	4.470	18,87
3.	Enrekang	32.667	112,18
4.	Cendana	8.846	97,20
5.	Baraka	22.805	143,29
6.	Buntu Batu	13.842	109,29
7.	Anggeraja	32.781	205,69
8.	Malua	8.329	206,38
9.	Alla	22.650	653,49
10.	Curio	16.481	92,33
11.	Masalle	13.027	190,59
12.	Baroko	10.642	259,05
	Total	214.826	2.152,72

Sumber : BPS Enrekang

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk Kabupaen Enrekang tahun 2019 adalah 214.826 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 2.152,72 km². Distribusi penduduk berdasarkan kecamatan menunjukkan keadaan tidak merata. Kecamatan yang paling banyak penduduk penduduknya adalah kecamatan Enrekang 32.667 jiwa, dari hal ini dipengaruhi karena kecamatan Enrekang berada di Ibukota.

Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah Kecamatan Bungin yaitu 4.470 jiwa dari total penduduk kabupaten Enrekang. Sedangkan untuk kepadatan penduduk paling tinggi adalah kecamatan Alla dan yang paling rendah adalah kecamatan Bungin.

B. Karakteristik Lokasi Penelitian

1. Kondisi Kantor BPBD Kabupaten Enrekang

Penyelenggara penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui suatu Badan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga yang secara terkhusus melaksanakan tugas penanggulangan bencana di Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/kota dengan pedoman pada kebijakan ang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB dan BPBD dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dengan adanya BNPB maka lembaga penanggulangan sebelumnya, yakni Badan Kordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB) dan rantai komando serta kordinasinya di daerah dibubarkan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dibentuk oleh pemerintah pusat pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang kedudukannya merupakan Lembaga Pemerintah non departemen yang setingkat dengan Menteri berdasarkan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk Pemerintah Daerah pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Secara normatif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 telah mengamanatkan pemerintah daerah sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pada dasarnya Pemerintah Daerah yang diberi peran lebih otonom dalam upaya tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi dan mensejahterakan setiap warga dan komunitas yang berada di wilayah kerjanya secara demokratis.
- b. Merupakan amanat dari Undang-Undang untuk memastikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dimasukkan ke dalam program pembangunan daerah termasuk pengalokasian dana.
- c. Ada semangat untuk pengembangan potensi sumber daya daerah yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana.
- d. Merupakan amanat untuk mengimplementasikan kegiatan pengurangan resiko bencana (PRB) hingga ke pemerintah daerah.
- e. Merupakan kewajiban meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimal.

f. Merupakan kewajiban pemerintah daerah memenuhi kebutuhan komunitas dalam kerangka kerja penanggulangan bencana yang diselenggarakan.

Atas dasar tersebut, maka kewajiban pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana telah diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang berbunyi :

- a. Penjaminan pemenuhan kebutuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai standar pelayanan minimal.
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
- c. Pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana dengan proram pembangunan, dan
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai.

Secara teknis BPBD dibentuk berdasarkan peraturan menteri dalam Nomor 46 tahun 2008 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Perkara (Perka) BNPB Nomor 3 tahun 2008 tentang pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, akan tetapi payung hukum tertinggi adalah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

Dengan memperhatikan kondisi daerah Kabupaten Enrekang terhadap resiko bencana yang mengancam kehidupan dan penghidupan komunitas masyarakatnya, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 pada tanggal 2 Oktober 2010.

1. Visi dan Misi BPBD Kabupaten Enrekang

Di dalam visi tersebut terkandung keinginan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai instansi yang bersifat kordinatif, komando dan pelaksanaan yang menangani penanggulangan bencana di Kabupaten Enrekang untukw mewujudkan rasa aman dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana yang mampu menjadi faktor pendorong dan menarik dalam mendukung perekonomian Kabupaten Enrekang dimasa mendatang. Maka visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang sebagai berikut :

“Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat Menghadapi Bencana Menuju Enrekang Maju, Aman, Sejahtera Berkelanjutan dan Religius”

Dalam mewujudkan pencapaian visi yang telah dicapai tersebut, maka implementasinya dijabarkan melalui misi dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya akan dituangkan dalam rumusan program kegiatan nantinya. Maka misi Badan Penanggulangan Benacana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara Terencana, Terpadu, dan Menyeluruh.
- b. Memperkuat Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang.

2. Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Enrekang

- a. Kepala Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 32 Tahun 2016 Pasal 3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang di pimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah . Untuk melaksanakan tugas kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki fungsi :

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, dan tepat, efektif dan efisien.
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

b. Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas menyiapkan bahan dalam penyelenggaraan dan kordinasi pelaksanaan sub bagian umum kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam melaksanakan tugas sekretaris memiliki fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga.
- 2) Penyelenggaraan administrasi umum.

- 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan program kegiatan sub bagian.
- 4) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.

c. Sub bagian Perencanaan

Sub bagian perencanaan memiliki tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan kebutuhan perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam melaksanakan tugas sub bagian memiliki fungsi:

- 1) Pelaksanaan kebijakan sub bagian
- 2) Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian
- 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan staf dalam lingkup bagian
- 4) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup sub bagian

d. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan memiliki tugas melaksanakan urusan penatausahaan administrasi keuangan serta merumuskan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di sub bagian serta membuat laporan secara berkala. Maka dalam melaksanakan tugas sub bagian keuangan memiliki fungsi :

- 1) Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian
- 2) Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian

- 3) Pembinaan, pengkordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan staf dalam lingkup sub bagian keuangan
- 4) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat staf dalam lingkup sub bagian keuangan.

e. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian kepegawaian memiliki tugas membantu sekretaris dalam penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Maka dalam melaksanakan tugas sub bagian umum dan kepegawaian memiliki fungsi :

- 1) Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian
- 2) Pelaksanaan program kegiatan dan sub bagian
- 3) Pembinaan, pengkordinasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian
- 4) Pelaksanaan evaluasi program dan kebijakan dalam sub bagian

f. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan memiliki tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan kegiatan di bidang penanggulangan bencana daerah. Maka dalam melaksanakan tugas bidang penanggulangan bencana memiliki fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang
- 2) Penyelenggaraan kebijakan bidang
- 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan seksi lingkup bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
- 4) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan seksi lingkup bidang pencegahan dan kesiapsiagaan

g. Bidang Kedaruratan dan logistik

Bidang Kedaruratan dan logistik memiliki tugas membantu kepala badan pelaksana di bidang kedaruratan dan kesiapsiagaan. Maka dalam menjalankan tugas bidang kedaruratan dan logistik mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang
- 2) Penyelenggaraan kebijakan bidang
- 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan bidang kedaruratan dan logistik

h. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas membantu kepala pelaksana di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Maka dalam menjalankan tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang
- 2) Penyelenggaraan kebijakan bidang

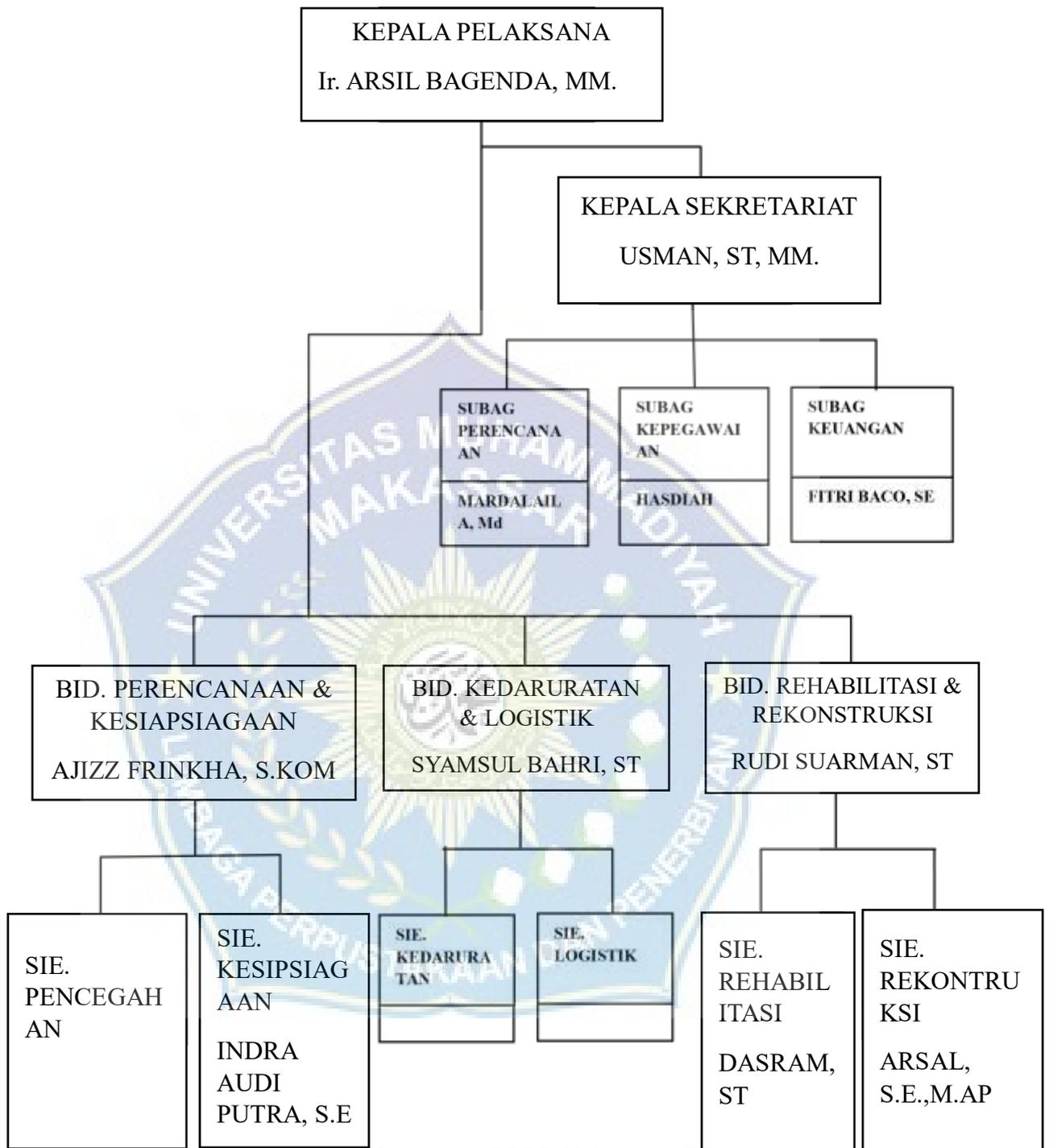
- 3) Pembinaan, pengkordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
- 4) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi



3. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Enrekang

Tabel 4.3

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang



Gambar: Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Enrekang

4. Data Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Enrekang adalah 57 orang, terdiri dari 42 orang laki-laki dan 5

orang perempuan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 15 orang dan Pegawai tidak tetap 42 orang. Lebih jelasnya sebagai berikut :

No	Kualifikasi ASN/NON ASN	Jumlah		Penduduk				
		L	P	SMA	DIII	S1	S2	S3
1.	ASN	9	6	5	1	7	2	0
2.	NON ASN	35	7	26	5	11	0	0
	JUMLAH	44	13	31	6	18	2	0

Sumber : Data dokumen BPBD Kabupaten Enrekang 2020

Berdasarkan tabel diatas pegawai yang ada di kantor BPBD memiliki jumlah 57 orang, baik yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai tidak tetap, masing-masing memiliki tugas dan beban kerja sebagai berikut :

a. Kesekretariatan

Pada bagian kesekretariatan terdapat 1 orang Kepala pelaksana, 1 orang Sekretaris, 3 orang Kasubbag, 14 orang Staf.

b. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pada bagian Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdapat 1 orang Kepala bidang, 1 orang Kepala seksi Rehabilitasi, 1 orang Kepala seksi Rekonstruksi dan 6 orang staf.

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdapat 1 orang Kepala bidang, kepala seksi pencegahan (kosong), kepala seksi logistik (kosong) dan 12 orang staf.

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pada Bidang Kedaruratan dan Logistik terdapat 1 orang Kepala bidang, kepala seksi Kedaruratan (kosong), kepala seksi logistik (kosong) dan 10 orang staf.

C. Hasil Penelitian

2. Karakteristik Informan

Dalam pembahasan ini penulis akan membahas data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian dilapangan yang terdiri dari beberapa pernyataan informan yang dihasilkan setelah melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang akan dibahas secara sistematis.

Pada bagian pertama penulis membahas mengenai karakteristik atau identitas dari informan yang masing-masing informan diantaranya yaitu, Sekretaris dan masyarakat yang berada pada kawasan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang. Setelah itu penulis membahas tentang Manajemen Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Penelitian ini yang menjadi informan terdiri dari 3 orang diantaranya :

- a. Usman, S.T, MM adalah seorang Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang
- b. Edi adalah masyarakat yang berada pada kawasan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang.
- c. Mustamin adalah masyarakat yang berada pada kawasan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang
- d. Tahir adalah masyarakat yang berada pada kawasan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang
- e. Fadurrahman adalah masyarakat yang berada pada kawasan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang
- f. Ahmad adalah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang
- g. Rahmadi adalah pegawai Kantor Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang

1. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Enrekang

Tabel 4.4

Data Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Enrekang Tahun 2019

No	Waktu Kejadian	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Jenis Bencana
1.	4 Februari 2019	Dulang	Malua	Kebakaran Hutan
2.	10 April 2019	Batili	Enrekang	Kebakaran

3.	25 April 2019	Maiwa	Maiwa	Kebakaran Rumah
4.	22 Juli 2019	Lewaja	Enrekang	Kebakaran Rumah
5.	29 Agustus 2019	Bangkala	Maiwa	Kebakaran Rumah
6.	17 September 2019	Tanete	Anggeraja	Kebakaran Lahan
7.	24 September 2019	Karrang	Cendana	Kebakaran Lahan
8.	26 September 2019	Tuara	Enrekang	Kebakaran Rumah
9.	4 Oktober 2019	Juppandang	Enrekang	Kebakaran Lahan
10.	5 Oktober 2019	Lewaja	Enrekang	Kebakaran Lahan
11.	23 Oktober 2019	Galonta	Enrekang	Kebakaran Lahan
12.	24 Oktober 2019	Potokullin	Buntu Batu	Kebakaran Lahan
13.	27 Oktober 2019	Pundilemo	Cendana	Kebakaran Lahan
14.	28 Oktober 2019	Tanete	Anggeraja	Kebakaran Lahan
15.	7 November 2019	Karrang	Cendana	Kebakaran Lahan
16.	15 November 2019	Bambapuang	Anggeraja	Kebakaran Lahan

Sumber : Diolah penulis dari data dokumen BPBD Kabupaten

Enrekang

Berdasarkan tabel diatas, sangat jelas terlihat bahwa kebakran yang sering terjadi sepanjang tahun 2019 adalah kebakaran lahan yang disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan membuka lahan dengan cara membakar serta adanya kelalaian masyarakat yakni membuang puntung rokok sembarangan.

Tabel 4.5
Data Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Enrekang
Tahun 2023

No	Waktu Kejadian	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Jenis Bencana
1.	31 Agustus 2023	Puserren	Enrekang	Kebakaran Rumah
2.	9 September 2023	Pana	Alla	Kebakaran Hutan
3.	10 September 2023	Sudda	Enrekang	Kebakaran Hutan
4.	18 September 2023	Botto Mallangga	Maiwa	Kebakaran Lahan
5.	21 September 2023	Sudda	Enrekang	Kebakaran Hutan
6.	21 September 2023	Saruran	Anggeraja	Kebakaran Hutan
7.	23 September 2023	Kabere	Cendana	Kebakaran Rumah
8.	26 September 2023	Galonta	Enrekang	Kebakaran Hutan

9.	26 September 2023	Mendatte	Anggeraja	Kebakaran Hutan
10.	28 September 2023	Maroangin	Maiwa	Kebakaran Hutan
11.	29 September 2023	Galonta	Enrekang	Kebakaran Rumah
12.	1 Oktober 2023	Pasui	Buntu batu	Keabakaran Lahan
13.	2 Oktober 2023	Lunjen	Buntu Batu	Kebakaran Lahan
14.	8 Oktober 2023	Mundan	Masalle	Kebakaran Rumah
15.	9 Oktober 2023	Randangan	Enrekang	Kebakaran Hutan
16.	16 Oktober 2023	Bolang	Alla	Kebakaran Rumah
17.	24 Oktober 2023	Parandean	Alla	Kebakaran Rumah
18.	29 Oktober 2023	Bambapuang	Anggeraja	Kebakaran Lahan
19.	30 Oktober 2023	Landokadawang	Baroko	Kebakaran Rumah

Sumber : Enrekang Dekat

Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar (Definisi dan Jenis Bencana, BNPB).

Parameter ukur dan sumber data yang digunakan untuk mengkaji bahaya kebakaran hutan dan lahan yaitu:

1. Jenis hutan dan lahan, menggunakan data peta penutupan/penggunaan lahan tahun 2015 dari KEMENLHK;
2. Iklim, menggunakan data peta curah hujan tahunan tahun 1998-2015 berdasarkan sumber data dari NOAA; dan
3. Jenis tanah, menggunakan data peta jenis tanah tahun 1998 dengan sumber data dari BBSDLP

Dari parameter ukur tersebut maka dapat ditentukan luas paparan bahaya kebakaran hutan dan lahan. Adapun hasil kajian bahaya kebakaran hutan dan lahan per Kecamatan di Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6

Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Per Kecamatan di Kabupaten Enrekang

BAHAYA			
No	Kecamatan	Luas (Ha)	Kelas
1.	Alla	4.219	Tinggi
2.	Anggeraja	2.999	Tinggi
3.	Baraka	2.058	Tinggi

4.	Baroko	2.653	Tinggi
5.	Bungin	1.525	Tinggi
6.	Buntu Batu	3.283	Tinggi
7.	Cendana	4.648	Tinggi
8.	Curio	11.483	Tinggi
9.	Enrekang	2.637	Tinggi
10.	Maiwa	13.838	Tinggi
11.	Malua	2.014	Tinggi
12.	Masalle	5.748	Tinggi
	Total	57.106	Tinggi

Sumber : Hasil analisa BPBD Kabupaten Enrekang Tahun 2022

Dari tabel tersebut memperlihatkan potensiluasan wilayah terpapar bahaya kebakaran hutan dan lahan per kecamatan di Kabupaten Enrekang. Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan tersebut dilihat berdasarkan luasan kecamatan yang memiliki kondisi rentan terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan berdasarkan kajian bahaya. Secara keseluruhan, luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang adalah 57.106 Ha yang berada pada kelas Tinggi. Kelas bahaya ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kecamatan terpapar bahaya kebakaran hutan dan lahan.

2. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Enrekang

Manajemen strategi yaitu serangkaian ketentuan dan kegiatan administratif yang memastikan kinerja perusahaan dalam masa yang lama (J. David Hunger

dan Thomas L. Wheelen, 2003). Manajemen strategi merupakan cara untuk menentukan visi, misi, dan tujuan organisasi serta peningkatan kebijakan dan program penerapan untuk mencapainya (Softjan, 2016).

a. Aspek Preventif

Aspek Preventif merupakan intervensi fisik mengawali kegiatan atau proses pembangunan fisik revitalisasi dan dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang. Maka dari itu, pemerintah daerah Kabupaten Enrekang harus melakukan beberapa kegiatan preventif seperti sosialisasi kepada masyarakat, edukasi dan penyuluhan, dan penyelidikan yang bertujuan untuk mengurangi angka kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Enrekang.

Dalam menjalankan fungsi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam upaya penanggulangan sebelum terjadi kebakaran hutan dan lahan sebagaimana wawancara penulis dengan pegawai kantor BPBD Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa :

“Yang kita lakukan sebelum terjadi kebakaran hutan dan lahan yaitu memberikan informasi melalui media, memasang papan informasi, dan biasa juga kita memberikan surat himbauan kepada pihak kecamatan-kecamatan untuk disampaikan ke masyarakat.” (Wawancara dengan Usman pada tanggal 2 Mei 2023).

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa BPBD Kabupaten Enrekang memberikan informasi melalui media merupakan upaya peringatan dini dalam mengurangi resiko bencana seperti kebakaran hutan

dan lahan, selain itu membuat surat himbauan yang ditujukan kepada pihak kecamatan dan ditindaklanjuti kepada masyarakat maupun membuat papan informasi dan memberikan surat edaran setiap kecamatan tentang rawan kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu tanggapan dari masyarakat yang berada pada kawasan kebakaran hutan dan lahan mengatakan bahwa :

“Kalau informasi di masjid belum saya tahu karena saya dulu waktu ada kebakaran baru datang pemadam sama BPBD dari Enrekang karena begitulah biasa kebakaran di sini baru ada yang datang apalagi dulu itu yang membakar di kebunnya”. (Wawancara dengan Edi pada tanggal 8 Mei 2023).

Tanggapan lain dari masyarakat yang berada di kawasan kebakaran hutan dan lahan mengatakan bahwa :

“Iya ada memang saya dapat informasi dari pemerintah itu waktu selesai dulu shalat tapi biasa pemadaman telat datang dan penyebabnya kebakaran dulu disini karena katanya ada yang buang puntung rokoknya sembarangan”. (Wawancara dengan Mustamin pada tanggal 10 Mei 2023).

Dapat diketahui bahwa beberapa masyarakat mendapatkan informasi tentang antisipasi kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau akan tetapi ada juga yang tidak mengetahui informasi tersebut, selain itu kebakaran disebabkan oleh faktor manusia yang membuka lahan serta kelalaian masyarakat yang membuang puntung rokok sembarangan di musim kemarau.

Selain itu upaya dalam penanggulangan bencana pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan sebagaimana wawancara penulis dengan pegawai kantor BPBD Kabupaten Enrekang mengatakan bahwa :

“Dalam melaksanakan fungsi ketika terjadi kebakaran ketika sudah ada informasi yang terjadi dilapangan maka kita membangun kordinasi dengan pihak kecamatan tempat terjadinya kebakaran untuk mengirim tim reaksi cepat untuk melakukan kajian cepat setelah itu tim reaksi cepat akan memberikan informasi terkait kelanjutan dari kebakaran”. (Wawancara dengan Tahir pada tanggal 3 Mei 2023).

Dapat diketahui bahwa upaya penanggulangan bencana saat terjadi kebakaran hutan dan lahan salah satunya melakukan pemadaman hal tersebut dilakukan ketika pihak BPBD Kabupaten Enrekang memperoleh informasi kejadian kabakaran untuk kemudian dilakukan tindaklanjuti oleh relawan atau Tim Reaksi Cepat yang berada di kecamatan terjadinya kebakaran, akan tetapi tidak dari rentetan peristiwa kebakaran nyaris mengalami keterlambatan dalam upaya pemadaman hal tersebut dipengaruhi dengan kondisi topografi wilayah yang didominasi oleh bukit-bukit atau gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan datar hanya 15,04%, serta kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi kepada pihak pemerintah.

b. Aspek Mitigasi

Aspek Mitigasi yaitu upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana alam atau akibat ulah manusia. Dalam upaya meminimalisir dampak bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) biasanya melakukan sosialisasi dan simulasi pada saat tiba waktu musim kemarau guna untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam

kebakaran hutan yang sering terjadi pada saat musim kemarau yang panjang.

Sebelum terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan dilakukan sosialisasi dan simulasi dalam hal ini pencegahan dini sebagaimana wawancara penulis dengan pegawai BPBD Kabupaten Enrekang yang mengatakan bahwa :

“Iya kita terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan simulasi pada masyarakat kalau musim kemarau sudah tiba untuk kegiatan antisipasi kebakaran hutan dan lahan dimana diikuti TRC BPBD, Personil Polres Enrekang, TRC Dinas Kesehatan, Tagana, PMI, Pramuka dan SSB”. (Wawancara dengan Ahmad pada tanggal 2 Mei 2023).

Dapat diketahui bahwa kerja sama yang dilakukan pihak BPBD sebelum terjadi kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan kerja sama dengan pihak pemadam kebakaran dari kota Makassar untuk membawakan materi gladi dan simulasi sebagai antisipasi kebakaran hutan dan lahan sekaligus sosialisasi dengan melibatkan pihak seperti TRC BPBD, Personil Polres Enrekang, TRC Dinas Kesehatan, Tagana, PMI, Pramuka, dan SSB sebagai peserta pada kegiatan tersebut.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat yang berada pada kawasan kebakaran hutan dan lahan yang mengatakan bahwa :

“Selama ini terjadi kebakaran baru dibantu petugas pemadam, dan itu juga tidak pernah ada sosialisasi sebelumnya adapi kebakaran baru ada pemerintah atau pihak BPBD yang datang”. (Wawancara dengan Fadurrahman pada tanggal 9 Mei 2023).

Dapat diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang sebelum terjadi kebakaran hutan dan lahan tidak dilakukan sosialisasi dan simulasi, terakhir dilakukan pada tahun 2015 melalui

program pengurangan resiko kebakaran (PRB) karena pihak Kecamatan melakukan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Enrekang ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang melakukan sosialisasi dan simulasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam upaya meminimalisir dampak bencana sebagaimana wawancara penulis dengan pegawai kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang.

c. Praperednes (kesiapsiagaan)

Praperednes (kesiapsiagaan) merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Carter (2008) menjelaskan bahwa dalam kegiatan manajemen pengelolaan bencana, aspek pra bencana harus betul-betul diperhatikan dengan serius.

Kesiapsiagaan pasca terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan, salah satunya membangun kerjasama maupun kordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang baik masalah penegakan hukum maupun upaya rehabilitasi sebagaimana wawancara penulis dengan pegawai kantor BPBD Kabupaten Enrekang bahwa :

“Untuk masalah pasca kebakaran biasanya kita bekerja sama dengan pihak kepolisian maupun kecamatan khususnya melakukan identifikasi penyebab kebakaran karena kemarin itu ada menjadi pelaku pembakaran untuk buka lahan di kebunnya dan pelaku itu sendiri yang menyerahkan diri”. (Wawancara penulis dengan Ahmad pada tanggal 2 Mei 2023).

Dapat diketahui bahwa kesiapsiagaan yang dilakukan BPBD Kabupaetn Enrekang pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran dimana pelaku menyerahkan diri kepada pihak kepolisian Kecamatan Anggeraja.

Pendapat yang sama disampaikan oleh salah satu pegawai kantor kecamatan Anggeraja yang mengatakan bahwa :

“Iya biasa itu pasca kebakaran kita berasama pihak kepolisian, dan pihak BPBD melakukan kerjasama kesiapsiagaan mencari pelaku pembakaran karena seperti kemarin itu ada yang membakar di kebunnya selain itu kita juga sampaikan sama masyarakat agar tidak melakukan kegiatan pembakaran khususnya kalau musim kemarau karena sebenarnya beberapa kebakaran yang terjadi ada pelakunya tapi setelah kita tanya masyarakat tidak da yang tahu”. (Wawancara penulis dengan Rahmadi pada tanggal 10 Mei 2023).

Dapat diketahui bahwa pihak kecamatan melakukan kesiapsiagaan berasa dengan kepolisian dan pihak BPBD dalam hal ini memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kebakaran lagi khususnya ketika memasuki musim kemarau. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat yang berada pada kawasan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana masyarakat mengatakan bahwa :

“Kalau setelah kebakaran paling pemerintah sama kepolisian kasih saja peringatan setelah itu tidak ada lagi itupun baru ada lagi kalau terjadi lagi kebakaran begitu selama ini tidak ada kesiapsiagaan yang lain”. (Wawancara penulis dengan Fadurrahman pada tanggal 9 Mei 2023).

Pendapat tersebut didukung oleh masyarakat lainnya yang berada pada kawasan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana wawancara penulis dengan masyarakat mengatakan bahwa :

“Selama ini tidak ada bentuk kesiapsiagaan ketika sudah terjadi kebakaran kalau terjadi ada karena disini saja dulu ada panggung tempat orang foto-foto biasanya terbakar tapi tidak adaji juga bantuan perbaikan dari pihak pemerintah”. (Wawancara penulis dengan Tahir pada tanggal 9 Mei 2023).

Berdasarkan wawancara dengan informan terkait kesiapsiagaan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang dapat diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang melakukan kesiapsiagaan bersama pihak BMKG, pembuatan surat edaran antisipasi, dan mendirikan posko siaga di beberapa wilayah yang ada di kabupaten Enrekang khususnya yang rentan terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang melakukan kesiapsiagaan pada saat terjadi kebakaran dengan pihak kecamatan, kepolisian, TNI, dan masyarakat yang berada pada kawasan kebakaran hutan dan lahan dalam hal tersebut melakukan pemadaman api serta mengkoordinasikan kepada masyarakat untuk tetap waspada agar tidak terjadi kebakaran susulan.

Adapun yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang pasca kebakaran hutan dan lahan dengan pihak kecamatan maupun kepolisian yakni penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran dimana di tahun 2019 terdapat 1 pelaku pembakaran yaitu tepatnya di kecamatan anggeraja, akan tetapi pemerintah baik BPBD Kabupaten Enrekang maupun pihak lainnya hanya melakukan kesiapsiagaan kebakaran bersama dengan masyarakat saat terjadi kebakaran

padahal kasus tersebut perlu dilakukan bersama dalam upaya perbaikan saran dan prasarana umum.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang didapatkan di lapangan serta sesuai dengan teori yang digunakan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori manajemen penanganan kebakaran hutan dan lahan (Kerhutla) menurut Carter (2008). Teori tersebut digunakan untuk sejauh mana manajemen strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), melalui beberapa indikator, diantaranya aspek preventif, aspek mitigasi, dan kesiapsiagaan. Berdasarkan hasil penelitian tentang manajemen strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang maka peneliti menemukan hal sebagai berikut :

1. Aspek preventif

Aspek preventif merupakan upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang agar tidak terjadi bencana. Intervensi fisik mengawali kegiatan atau proses pembangunan fisik revitalisasi dan dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata hijau, dan sistem penghubung. Berdasarkan hasil penelitian, preventif ditunjukkan dengan adanya sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang untuk mengurangi bencana

kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang yang biasanya terjadi pada musim kemarau.

Dari pernyataan informan bahwa pelaksanaan penanggulangan diantaranya, saat terjadi dan pasca bencana, dimana BPBD Kabupaten Enrekang melaksanakan kegiatan sebelum terjadi kebakaran hutan dan lahan dengan memberikan informasi melalui media online serta memberikan informasi melalui surat edaran kepada pihak kecamatan perihal antisipasi bencana saat memasuki musim kemarau salah satunya mengurangi dampak kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang. Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti tidak menemukan surat himbuan perihal antisipasi resiko bencana kebakaran di musim kemarau melainkan surat himbuan nomor 47/153/BPBD perihal antisipasi cuaca ekstrim dan resiko bencana. Selain itu, informasi peringatan antisipasi kebakaran di musim kemarau kepada masyarakat dapat dikatakan kurang optimal, sebab waktu kejadian kebakaran hutan dan lahan itu mulai pada bulan september 2019 sedangkan pihak BPBD baru memberikan peringatan dini di bulan Oktober 2019 di salah satu media online.

2. Aspek Mitigasi

Aspek Mitigasi yang dimaksud yaitu upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang untuk mengurangi resiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana. Dari hasil observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa upaya BPBD Kabupaten Enrekang dalam melaksanakan

pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan dengan mengadakan sosialisasi dan simulasi antisipasi kebakaran hutan dan lahan.

Secara fungsional pihak BPBD Kabupaten Enrekang melakukan kerja sama langsung dengan pihak kebakaran kota Makassar pada kegiatan sosialisasi dan gladi tersebut yang diikuti oleh peserta dari perwakilan TRC BPBD Kabupaten Enrekang, pihak Kodim 1419 Enrekang, pihak Polres Enrekang, TAGANA, PMI, PRAMUKA, dan SSB. Sedangkan untuk operasional yaitu melakukan pemadaman api bersama dengan pihak kepolisian, TNI dan Masyarakat yang berada disekitar lokasi kebakaran. Dalam melakukan sosialisasi dan simulasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Enrekang hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.7

Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Enrekang

No	Unsur Pelaksana	Jumlah
1.	TRC BPBD Kabupaten Enrekang	19 orang
2.	Unsur teknis PU Kabupaten Enrekang	5 orang
3.	Unsur kesehatan dari dinas kesehatan Kabupaten Enrekang	5 orang

4.	Unsur sosial ekonomi dari dinas sosial Kabupaten Enrekang	5 orang
5.	Unsur pengamanan dari satpol PP- Damkar Kabupaten Enrekang	8 orang
	Jumlah	42 orang

Sumber: Data BPBD Kabupaten Enrekang 2019

Berdasarkan tabel diatas jumlah personil Tim Reaksi Cepat BPBD berjumlah 42 orang yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati Enrekang Nomor 20/KEP/IV/2019 tentang pembentukan Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang.

Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang melakukan pelatihan sosialisasi dan simulasi antisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan surat tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Enrekang nomor 303/ST/BPBD/X/2019 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2019 di Desa Karrang, Kecamatan Cendana. Kegiatan tersebut di ikuti oleh beberapa lembaga dan masyarakat di Kabupaten Enrekang diantaranya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.8

Jumlah Peserta yang mengikuti Simulasi Antisipasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Enrekang

No	Lembaga	Jumlah Personil	Pelatihan
----	---------	-----------------	-----------

1.	TRC BPBD Kabupaten Enrekang	17 orang	Materi dan Teknis
2.	Personil Kodim 1419 Enrekang	4 orang	Materi dan Teknis
3.	Personil polres Enrekang	3 orang	Materi dan Teknis
4.	TRC Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang	3 orang	Materi dan Teknis
5.	Tagana	3 orang	Materi dan Teknis
6.	PMI	3 orang	Materi dan Teknis
7.	Pramuka	4 orang	Materi dan Teknis
8.	SSB	6 orang	Materi dan Teknis
9.	Masyarakat	8 orang	Materi dan Teknis
	Total	51 orang	

Sumber: Data BPBD Kabupaten Enrekang 2019

Berdasarkan data tersebut BPBD Kabupaten Enrekang melaksanakan kegiatan simulasi antisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan dengan jumlah peserta 51 orang dan pelatihan berupa materi dan simulasi.

Akan tetapi, pelaksanaan simulasi dapat dikatakan kurang optimal sebab tidak disertakan dengan kegiatan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, padahal seperti yang diketahui kegiatan simulasi diikuti oleh beberapa unsur kelembagaan dan dapat dikatakan memiliki kapasitas pengetahuan untuk disampaikan kepada masyarakat terkait antisipasi kebakaran hutan dan lahan sebab data BPBD Kabupaten Enrekang bukan hanya di Kecamatan Cendana saja yang terjadi kebakaran hutan dan lahan melainkan juga terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Enrekang, jadi

bisa disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi dan simulasi bencana kebakaran hutan dan lahan yang diadakan BPBD Kabupaten Enrekang belum dilakukan secara berkesinambungan atau kurang optimal. Kurangnya fasilitas pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Enrekang juga menjadi salah satu penghambat dalam pemadaman api saat terjadi kebakaran, karena jumlah DAMKAR yang ada di Kabupaten Enrekang yang hanya berjumlah 2 unit DAMKAR sedangkan luas wilayah Kabupaten Enrekang sekitar 1.786.01 km².

3. Praperednes (Kesiapsiagaan)

Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang untuk mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang. Adapun beberapa bentuk kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Enrekang yaitu bekerja sama dengan BMKG, membuat edaran antisipasi, dan mendirikan posko siaga. Melihat pada upaya yang dilakukan BPBD Kabupaten Enrekang, upaya paling maksimal adalah tindakan masa tanggap darurat ataupun persiapan saat api muncul. Terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Enrekang mengindikasikan bahwa metode yang dilakukan BPBD Kabupaten Enrekang belum maksimal menyentuh akar masalah.

Mengacu pada gagasan Carter (2008), aspek penting sebenarnya adalah penggalangan dan pelibatan partisipasi masyarakat secara maksimal. Tanpa adanya partisipasi masyarakat maka bencana cenderung terjadi, apalagi

dalam konteks kebakaran hutan dan lahan, partisipasi masyarakat untuk sama-sama sadar akan dampak bencana harus dikedepankan. Masyarakat merupakan unsur terdepan, mereka yang tahu secara dini terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Disinilah pentingnya optimalisasi manajemen bencana BPBD Kabupaten Enrekang mengedepankan upaya-upaya strategis yang seharusnya dilakukan di semua sisi. Memaksimalkan semua potensi dan peluang yang ada, termasuk mencari terobosan yang sifatnya mendorong partisipasi dan keterikatan semua pihak terhadap kelestarian dan keutuhan lahan yang ada di Kabupaten Enrekang, upaya ini yang belum tersentuh secara maksimal. Dalam konteks kebakaran hutan dan lahan, bencana ini bisa dihindari asalkan ada kekuatan bersama di masa pra bencana. Optimalisasi tersebut mempunyai tiga aspek penting yaitu, formulasi maksimal untuk strategi terkoordinasi pada semua unsur dan semua sektor terkait, dan kesiapan sarana prasarana yang terkoordinasi dan terfokus pada penguatan ekonomi dan kelembagaan masyarakat. Sarana dan prasarana ini juga ditekankan pada tindakan di masa pra bencana, bukan hanya untuk mengatasi saat kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kabupaten Enrekang.

Selain itu, pada saat terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan BPBD Kabupaten Enrekang juga melakukan kerja sama operasional dengan unsur terkait serta mengikut sertakan masyarakat sekitar dalam melakukan pemadaman api di beberapa lokasi Kebakaran di Kabupaten Enrekang pada Tahun 2019 yang lalu, dari kerja sama tersebut tidak dilakukan kordinasi

kepada unsur terkait sebab ketika terjadi kebakaran pihak BPBD Kabupaten Enrekang langsung melakukan kegiatan pemadaman adapun dilakukan kordinasi ketika terjadi penetapan siaga darurat akan tetapi pencegahan dan pengendalian hanya sampai pada tahap pemadaman.

Sehingga dapat diketahui bahwa kesiapsiagaan yang dilakukan BPBD Kabupaten Enrekang dengan unsur terkait maupun masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat dikatakan sudah hampir maksimal sebab beberapa kasus kebakaran belum dilakukan siaga darurat melainkan sampai pada tahan pemadaman.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Enrekang penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut.

Strategi BPBD Kabupaten Enrekang dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang masih terdapat kekurangan pada pelaksanaan sebelum dan pasca terjadinya kebakaran terlihat dari partisipasi dan kesadaran masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan, sarana dan prasarana untuk kegiatan sebelum dan pasca kebakaran kurang memadai serta tidak terdapat kesiapsiagaan yang efektif pasca kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut dengan hasil penelitian yang diperoleh, beberapa masukan yang disarankan peneliti kepada pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar dapat meningkatkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang yakni :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Pemerintah Kabupaten Enrekang perlu untuk meningkatkan manajemen bencana seperti langkah-langkah pencegahan sebelum dan pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang perlu membuat standar teknis pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang.



Ananda, Firda Rizky, Eko Priyo Purnomo, Aqil Teguh Fathani, and Lubna Salsabila. 2022. "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Kotawaringin Barat." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 11(2):173–81.

Carter, 2008. "*Manajemen Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Guna Peningkatan Ekonomi Kerakyatan.*"

Chandya, Tiwi. 2021. "Manajemen Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Di Kabupaten Ketapang."

Gorontalo Journal of Government and Political Studies 4(1):96–103.

Kasmira. 2020. “Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Gowa.” *Administrasi Negara*.

Loren, Adithea, Muhammad Ruslan, Fadly H. Yusran, and Fonny Rianawati.

2015. “Analisis Faktor Penyebab Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Masyarakat Di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.” *EnviroScienteeae* 11(1):1–9.

Lumabi, Serly, Samuel P. Ratag, and Josephus I. Kalangi. 2022. “Peran Masyarakat Kelurahan Batuputih Bawah Dan Kelurahan Batuputih Atas Terhadap Perlindungan Hutan Dan Lahan Dari Kebakaran Di Kecamatan Ranowulu Kota Bitung Sulawesi Utara.” *Silvarum* 1(1):7–9.

Munawir, Munawir, Maskupah Maskupah, and Reza Kurniawan. 2019. “Manajemen Strategi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat Dalam Eduksi Literasi Keuangan.” *Cross-Border* 2(1):1–21.

Qodriyatun, Sri Nurhayati. 2014. “Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan.” *Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. Jakarta*.

Rasyid, Fachmi. 2014. “Permasalahan Dan Dampak Kebakaran Hutan.” *Jurnal Lingkar Widya Swara* 1(4):47–59.

Saharjo, Bambang Hero, and Robi Deslia Walidi. 2019. “Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di IUPHHK-HT PT Finnantara Intiga Provinsi Kalimantan Barat.” *Jurnal Silviculture Tropika* 10(1):7–14.

Suhendri, Suhendri, and Eko Priyo Purnomo. 2017. “Penguatan Kelembagaan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi.” *Journal of Governance and Public Policy* 4(1):174–204.

Tribun Enrekang .com, 2019 “Lahan seluas 3 hektar di desa Bambapuang Enrekang terbakar”

Wibowo, Agung Mukti, Zaenal Mustofa, and Suci Utami Wikaningtyas. 2018.

“Strategi Peningkatan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan Dalam Penanggulangan Bencana.”

Yuniar, Vira, Meiliyana Meiliyana, and Apandi Apandi. 2022. “Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan.” *Jurnal Administrativa* 4(1):91–100.



**OPERASIONAL KONSEP/PEDOMAN WAWANCARA STRATEGI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN KABUPATEN ENREKANG**

RUMUSAN MASALAH	INDIKATOR MASALAH	INFORMAN	PERTANYAAN
<p>Bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang</p>	<p>Preventif (Upaya yang dilakukan agar tidak terjadi bencana)</p>	BPBD	<p>1) Bagaimana strategi BPBD dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Enrekang?</p> <p>2) Bagaimana dengan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Apakah masyarakat ikut berpartisipasi?</p> <p>3) Bagaimana bentuk pengendalian yang akan dilakukan BPBD selanjutnya?</p> <p>4) Bagaimana dengan strategi pengendalian saat ini, Apakah sudah dijalankan semua?</p>
		Masyarakat	<p>1) Apa saja bentuk partisipasi masyarakat dalam pengendalian?</p>
	<p>Mitigasi (Upaya meminimalisir dampak bencana)</p>	BPBD	<p>1) Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengurangi angka kebakaran hutan?</p> <p>2) Apa saja faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan?</p> <p>3) Apakah BPBD sudah terlibat dalam upaya pengendalian?</p> <p>4) Apa saja dampak dari kebakaran hutan dan lahan?</p>

	Preparedness (Kesiapsiagaan)	Staf BPBD	<p>1) Bagaimana BPBD mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan?</p> <p>2) Apa saja kendala BPBD dan masyarakat dalam mengantisipasi?</p> <p>3) Apa saja bentuk kesiapsiagaan BPBD?</p>
		Pegawai Kecamatan Anggeraja	<p>1) Apa saja dampak yang dirasakan masyarakat?</p> <p>2) Bagaimana masyarakat dalam menyikapi dampak tersebut?</p>



L

A

M

P

I

R

A

N





Nomor : 0426/FSP/A.1-VIII/III/1444 H/2023 M
Lamp. : 1 (satu) Eksemplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Aglia Maydiarni
S t a m b u k : 10564 11061 19
J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Enrekang
Judul Skripsi : *"Manajemen Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Enrekang"*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu, Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 09 Maret 2023
Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan

Ahmad Harakan, S.IP, M.H.I

NBM

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 73.16/196/DPMPTSP/ENR/IP/III/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

AGLIA MAYDIARNI

Nomor Induk Mahasiswa : 10564 1106119
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Lembaga : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Pekerjaan Peneliti : MAHASISWI
Alamat Peneliti : PASARAN KEC. ANGERAJA
Lokasi Penelitian : KANTOR BPBD KAB. ENREKANG
Anggota/Pengikut :

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN SKRIPSI** dengan judul :

MANAJEMEN STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN ENREKANG

Lamanya Penelitian : 2023-03-24 s/d 2023-05-14

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaatl semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud dan tujuan yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaatl ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang
24/03/2023 10:19:00
KEPALA DINAS,



Dr. Ir. CHAIDAR BILLU, ST, MT
Pangkat: Pembina Ttd
NIK: 19750528 200212 1 005

Tembusan Kepada: th:

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Balaikota/Kab. Enrekang
3. Disatubah/Carat tempat peneliti
4. Mahasiswa ybc.

BPPT

Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah, dikarenakan telah diandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengujian dan Penerapan Teknologi

Wawancara dengan Sekretaris BPBD Kabupaten Enrekang





Wawancara dengan Pegawai Kecamatan Anggeraja



Wawancara dengan Staf BPBD Kabupaten Enrekang



Wawancara dengan Masyarakat







**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Aglia maydiarni

Nim : 105641106119

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	5 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	4 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 04 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



BAB I Aglia maydiarni

105641106119

by Tahap Tutup



Submission date: 04-Jan-2024 11:29AM (UTC+0700)

Submission ID: 2266589084

File name: BAB_I_-_2024-01-04T123941.374.docx (17.01K)

Word count: 923

Character count: 6236

AB I Aglia maydiarni 105641106119

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jdod.ejournal.unri.ac.id

Internet Source

2%

2

www.slideshare.net

Internet Source

1%

3

dpplpm-indonesia.blogspot.com

Internet Source

1%

4

mafiadoc.com

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

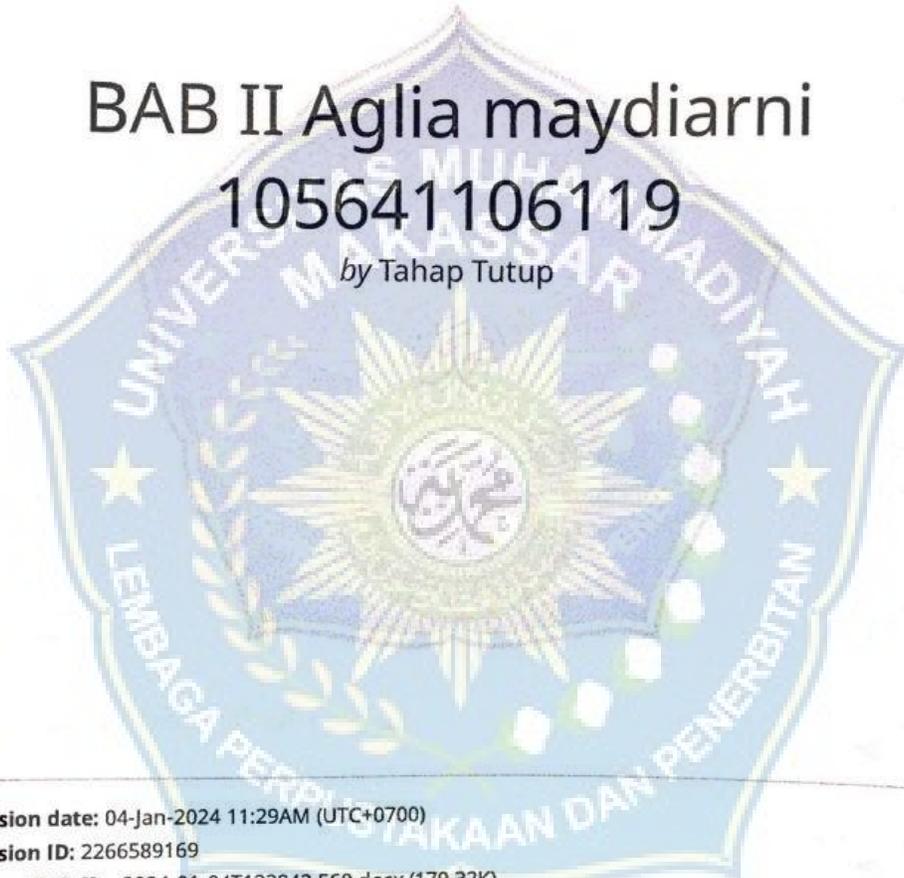
Exclude matches Off



BAB II Aglia maydiarni

105641106119

by Tahap Tutup



Submission date: 04-Jan-2024 11:29AM (UTC+0700)

Submission ID: 2266589169

File name: BAB_II_-_2024-01-04T123942.560.docx (179.32K)

Word count: 3677

Character count: 24780

SAB II Aglia maydiarni 105641106119

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	core.ac.uk Internet Source	13%
2	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	5%
3	administrativa.fisip.unila.ac.id Internet Source	3%
4	www.coursehero.com Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Mulawarman Student Paper	1%
6	123dok.com Internet Source	<1%
7	jurnal.pancabudi.ac.id Internet Source	<1%
8	repository.its.ac.id Internet Source	<1%
9	text-id.123dok.com Internet Source	<1%



BAB III Aglia maydiarni

105641106119

by Tahap Tutup



Submission date: 04-Jan-2024 11:30AM (UTC+0700)

Submission ID: 2266589235

File name: BAB_III_-_2024-01-04T123943.995.docx (17.82K)

Word count: 918

Character count: 6224

 Dipindai dengan CamScanner

BAB III Aglia maydiarni 105641106119

ORIGINALITY REPORT

10%	5%	0%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.umy.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to Universitas Maritim Ali Haji Student Paper	2%
3	docplayer.info Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper	2%
5	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB IV Aglia maydiarni

105641106119

by Tahap Tutup



Submission date: 04-Jan-2024 11:30AM (UTC+0700)

Submission ID: 2266589343

File name: BAB_IV_-_2024-01-04T123945.000.docx (223.74K)

Word count: 5862

Character count: 37680



Dipindai dengan CamScanner

BAB IV Aglia maydiarni 105641106119

ORIGINALITY REPORT

4% SIMILARITY INDEX	4% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	2% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	4%
----------	------------------------------------------------------	-----------

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

turniti
Exclude matches On



BAB V Aglia maydiarni

105641106119

by Tahap Tutup



Submission date: 04-Jan-2024 11:30AM (UTC+0700)

Submission ID: 2266589415

File name: BAB_V_-_2024-01-04T123946.148.docx (13.89K)

Word count: 265

Character count: 1776

AB V Aglia maydiarni 105641106119

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



pt.slideshare.net
Internet Source

3%



Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



RIWAYAT HIDUP



Aglia Maydiarni, Lahir di Pasaran pada tanggal 27 Februari 2001. Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Edi dan Ibu Suarni. Penulis berasal dari Kabupaten Enrekang, namun saat ini penulis berdomisili di Jl. Sultan Alauddin. Penulis pertama kali memasuki jenjang pendidikan di TK Aisyah Cakke pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 111 Pasaran dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Anggeraja dan tamat pada tahun 2016. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Enrekang dan tamat pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2024 penulis mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik dengan judul penelitian “Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Enrekang”. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat apa saja yang penulis dapat selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.